

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sumber utama pendapatan daerah Kota Padang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) melalui bendahara penerimaan. Badan Pendapatan Daerah memiliki peran penting dalam merencanakan, menggali, mengelola, dan mengawasi sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya PAD. BAPENDA bertanggung jawab atas proses penetapan, pemungutan, dan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi, serta sumber-sumber lain yang sah.

Bendahara Penerimaan adalah orang untuk menerima, menyimpan, yang ditunjuk menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian/Lembaga (NEGARA & INDONESIA, 2022). Dalam struktur organisasi BAPENDA, salah satu pihak yang memegang peran penting adalah Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan bertugas menerima, mencatat, menyimpan sementara, dan menyetorkan uang pendapatan daerah ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas seluruh transaksi penerimaan yang terjadi.

Namun, dalam proses pelaksanaan prosedur penerimaan pendapatan daerah tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain adalah ketidaksesuaian antara prosedur operasional yang dilakukan dengan peraturan perundang-undangan, seperti keterlambatan penyetoran ke kas daerah, serta ketidaktertiban dalam pencatatan transaksi. Permasalahan-permasalahan ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian secara administratif, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan sistem akuntansi, prosedur penerimaan kas harus dilaksanakan secara tertib dan terdokumentasi untuk memastikan keandalan pelaporan keuangan serta mencegah terjadinya kecurangan atau penyimpangan. Teori ini sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Melihat pentingnya penerimaan pendapatan daerah dalam mendukung pembangunan daerah, serta peran strategis BAPENDA dan Bendahara Penerimaan dalam proses tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang mendalam untuk menganalisis bagaimana prosedur penerimaan dijalankan di lapangan. Penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang ada dan memberikan rekomendasi terhadap perbaikan prosedur yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis prosedur penerimaan pendapatan daerah melalui Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan prosedur penerimaan pendapatan daerah melalui Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan prosedur penerimaan pendapatan daerah?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan meningkatkan efektivitas penerimaan pendapatan daerah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis pelaksanaan prosedur penerimaan pendapatan daerah melalui Bendahara Penerimaan pada BAPENDA Kota Padang.
- b. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur tersebut.
- c. Memberikan gambaran mengenai upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan pendapatan daerah.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat bagi Penulis:

- a. Sebagai sarana penerapan teori yang telah diperoleh selama masa studi dalam konteks praktik lapangan.
- b. Menambah wawasan dan pemahaman mengenai sistem administrasi keuangan daerah.
- c. Melatih kemampuan analisis kritis dan penyusunan laporan ilmiah yang sistematis.

Manfaat bagi BAPENDA Kota Padang :

- a. Memberikan masukan terhadap pelaksanaan prosedur penerimaan yang dijalankan saat ini.
- b. Membantu mengidentifikasi kendala administratif dan teknis dalam proses penerimaan.

## 1.5 Tempat dan Waktu Magang

Magang ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang, yang beralamat di Jl. Sawahan No. 50, Sawahan Timur, Kel. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, mulai dari tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang adalah lembaga pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengumpulan, dan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang. Kegiatan magang ini akan dilaksanakan dalam waktu 40 hari kerja. Penulis berharap kegiatan

magang ini dapat memaksimalkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh selama magang, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi BAPENDA Kota Padang.

### **1.6 Metode Pengumpulan Data**

Kegiatan ini magang dilaksanakan pada instansi pemerintahan yakni Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, dengan menggunakan metode observasi. Observasi dilakukan dengan cara mengunjungi langsung instansi pemerintah untuk melakukan pengamatan dan meneliti secara langsung, dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

### **1.7 Ruang Lingkup Pembahasan**

Agar pembahasan ini tidak meluas, penelitian akan terkonsentrasi pada Analisis Prosedur Penerimaan Pendapatan Daerah Melalui Bendahara Penerimaan Pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang.

### **1.8 Sistematika Penulisan Laporan**

Laporan magang ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab utama. Bab I merupakan Pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Magang, serta Sistematika Penulisan Laporan. Pada bagian latar belakang, penulis menjelaskan relevansi topik yang diangkat serta alasan pentingnya pembahasan tersebut. Rumusan masalah dirancang untuk merumuskan pertanyaan utama yang ingin dijawab selama proses magang, sehingga membantu memperjelas arah dan fokus penelitian. Tujuan

dan manfaat magang dijelaskan untuk menunjukkan kontribusi dari pelaksanaan magang baik bagi penulis maupun pihak instansi. Sistematika penulisan dijabarkan untuk memberikan gambaran struktur laporan secara menyeluruh.

Bab II membahas Landasan Teori, yang berisi kajian pustaka dan teori-teori yang menjadi dasar analisis dalam laporan ini. Landasan teori ini menjadi acuan konseptual untuk memahami fenomena yang diamati selama pelaksanaan magang, sekaligus memperkuat keilmiahan dari pembahasan yang dilakukan.

Bab III memuat Gambaran Umum Perusahaan. Pada bab ini, penulis menjabarkan informasi mengenai sejarah dan perkembangan instansi, visi dan misi, serta struktur organisasi yang ada. Pemahaman terhadap latar belakang instansi menjadi penting untuk memahami konteks operasional dan sistem kerja yang berlaku.

Bab IV adalah bagian Pembahasan, yang berisikan hasil study lapangan selama berada di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang menyangkut prosedur penerimaan pendapatan daerah.

Bab V merupakan Penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan hasil temuan dan pembahasan pada bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sementara itu, saran disampaikan sebagai bentuk rekomendasi bagi pihak instansi terkait maupun sebagai kontribusi bagi pengembangan pengetahuan di bidang yang diteliti.

